

## Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Kustiono Kastaji<sup>1</sup>, Akhyak<sup>2</sup>, As'aril Muhajir<sup>3</sup>, Nur Efendi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; Indonesia

correspondence e-mail\*, [kustiono273@gmail.com](mailto:kustiono273@gmail.com), [akhyak67@gmail.com](mailto:akhyak67@gmail.com), [arilmuhajir@gmail.com](mailto:arilmuhajir@gmail.com),  
[nurefendi2016@gmail.com](mailto:nurefendi2016@gmail.com)

Submitted:

Revised: 2024/05/01

Accepted: 2024/05/11

Published: 2024/05/30

Abstract	The purpose of writing this work is to analyze the form of an external quality assurance system (SPME). The library research method for studying the External Quality Assurance System (SPME) in Indonesian higher education involves collecting, analyzing and interpreting secondary data from various trusted sources such as books, scientific journals, articles, reports and official documents. The steps include identifying and selecting relevant literature, reviewing the literature to understand SPME concepts and practices, and organizing and synthesizing data to provide a comprehensive picture of SPME. It is hoped that the results of this research can be used as a basis for developing strategies to improve the quality of higher education in Indonesia. The result of this work is that the implementation of the External Quality Assurance System (SPME) in Indonesian higher education institutions faces various obstacles such as limited human resources, facilities and infrastructure, as well as financial constraints, which hinder the effectiveness of quality assurance. To overcome these obstacles, increased resource support, technological infrastructure and ongoing professional training are needed. Collaboration between universities, accreditation institutions, government and industry is very important to improve the quality of higher education. With the right strategy, the quality of higher education in Indonesia can be improved, producing graduates who are competent and ready to compete on the global stage.
Keywords	Higher Education, External Quality Assurance, System



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang terjadi dengan begitu cepat menuntut berbagai aspek kehidupan,<sup>1</sup> termasuk di dalamnya pengelolaan perguruan tinggi, untuk terus beradaptasi dan berkembang. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam

<sup>1</sup> Nurma Atiah, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0," in *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2020.

mencetak generasi penerus bangsa yang kompeten dan siap bersaing di kancah global.<sup>2</sup> Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan perguruan tinggi harus mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Standarisasi ini menjadi acuan utama dalam setiap aspek pengelolaan perguruan tinggi guna memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan mutu perguruan tinggi diatur oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang menetapkan standar-standar akreditasi bagi perguruan tinggi dan program studi.<sup>3</sup> Berdasarkan data yang ada, dari 4.472 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, hanya 50 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan program studi yang terakreditasi A baru sebanyak 2.512.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang harus berbenah diri untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) menjadi sangat krusial dalam upaya perbaikan mutu tersebut.

Rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia dapat dilihat dari hasil akreditasi yang masih jauh dari harapan. Banyak perguruan tinggi yang belum mampu menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara optimal karena berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang belum memadai. Akibatnya, banyak perguruan tinggi yang operasionalnya diberhentikan karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN PT. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang harus segera diatasi untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Arifudin (2019), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di Indonesia dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta lembaga-lembaga mandiri yang diakui pemerintah, dengan tujuan memastikan perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Sulaiman dan Wibowo (2016) menambahkan bahwa SPME merupakan kegiatan sistematis untuk menilai kelayakan program studi dan institusi pendidikan tinggi, dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Kusdiby Kusdiby, "Pendidikan Manajemen Transportasi Dan Logistik Universitas Maritim Amni Semarang Dalam Menghadapi Tantangan Global," *Attractive: Innovative Education Journal* 3, no. 3 (2021): 185–95.

<sup>3</sup> Luh Putu Widya Fitriani and Ida Ayu Aryani Kemenuh, "Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan," *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu* 2, no. 2 (2021); Endah Christianingsih, "Mengenal Manajemen Mutu Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 10, no. 1 (2020); Dwi Cahyono et al., "Upgrading Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru Di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2023): 355–60.

<sup>4</sup> Rahman Tanjung and Opan Arifudin, "Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah," *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)* 1, no. 1 (2023): 42–52.

BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi. Penilaian ini bertujuan mengawasi pelaksanaan pendidikan tinggi demi kepentingan masyarakat, berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik untuk menjamin mutu pendidikan yang diberikan.<sup>5</sup>

Studi terdahulu yaitu Sarvitri et al. (2020) mengidentifikasi bahwa keterbatasan utama dalam perencanaan dan penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya dana untuk mendukung kegiatan ini. Kekurangan tenaga ahli terlatih dan anggaran menghambat pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif. Ri et al. (2020) menambahkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dukungan teknologi dan jaringan internet, juga menjadi kendala signifikan. Fasilitas yang tidak memadai menghambat pembelajaran dan penelitian, serta akses internet yang tidak stabil mengganggu kegiatan akademik. Tanpa peningkatan signifikan dalam infrastruktur, perguruan tinggi akan terus kesulitan mencapai standar mutu pendidikan yang diharapkan.<sup>6</sup>

Novelty dalam penelitian ini bahwa penelitian ini berfokus pada sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan bagaimana implementasinya dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas sistem penjaminan mutu secara umum, penelitian ini akan memberikan penekanan khusus pada SPME dan bagaimana manajemen yang efektif dapat membantu perguruan tinggi mencapai standarisasi akreditasi.

GAP dalam karya ini bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji manajemen SPME dan implementasinya di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang SPME dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Tujuan penulisan karya ini untuk menganalisis bentuk sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).

## **METODE**

---

<sup>5</sup> Opan Arifudin, "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3, no. 1 (2019): 163; Ahmad Sulaiman and Udik Budi Wibowo, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 25.

<sup>6</sup> Anne Sarvitri, Achmad Supriyanto, and Agus Timan, "Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal," *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 47; B K D Ri, Gd Nusantara I Lt, and Jl Jend Gatot Subroto, "Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19," *Google Scholar Samsudin, S.(2019). Pentingnya Peran Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 1, no. 2 (2020): 15.

Metode library research atau penelitian kepustakaan untuk mengkaji Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi Indonesia. Metode ini dipilih karena peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data sekunder yang relevan dari berbagai sumber terpercaya. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan informasi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dokumen resmi, dan sumber-sumber online yang terkait dengan topik SPME. Langkah pertama dalam metode ini adalah identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan. Peneliti melakukan pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci seperti "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal," "SPME di perguruan tinggi Indonesia," "akreditasi perguruan tinggi," dan "mutu pendidikan tinggi." Sumber-sumber yang digunakan mencakup publikasi dari badan akreditasi, artikel jurnal ilmiah, buku teks tentang manajemen mutu pendidikan, dan laporan dari institusi pendidikan serta pemerintah. Selanjutnya, peneliti melakukan review literatur untuk memahami konsep, teori, dan praktik terkait SPME. Dalam tahap ini, setiap sumber informasi dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kesenjangan penelitian, dan implikasi praktis dari SPME. Peneliti juga mengumpulkan data historis dan statistik untuk memberikan konteks dan mendukung analisis. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian dan sintesis data. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber diorganisir berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti kebijakan akreditasi, implementasi SPME, dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Sintesis data dilakukan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai SPME di perguruan tinggi Indonesia. Terakhir, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Metode library research ini memberikan pemahaman mendalam tentang SPME, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kendala finansial yang menghambat alokasi anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu. Selain itu, rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya SPME di kalangan sivitas akademika, kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen perguruan tinggi, serta kompleksitas proses birokrasi menambah tantangan dalam

implementasi SPME. Hambatan eksternal seperti perubahan regulasi yang sering dan tekanan dari pihak luar juga memperumit upaya perguruan tinggi dalam mencapai standar akreditasi yang diharapkan. Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan strategi yang terintegrasi, dukungan kebijakan yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga akreditasi, dan perguruan tinggi itu sendiri.

Karya Sarvitri et al., (2020) bahwa keterbatasan utama dalam pelaksanaan perencanaan dan penjaminan mutu di perguruan tinggi disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang tersebut, serta terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini. Kekurangan tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman dalam perencanaan strategis dan penjaminan mutu mengakibatkan proses ini tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat perguruan tinggi sulit untuk mengadakan pelatihan, memperbaiki fasilitas, dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang efektif. Kedua faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghalang signifikan dalam upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.<sup>7</sup>

Karya Ri et al., (2020) bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam hal dukungan teknologi dan jaringan internet, menjadi salah satu kendala signifikan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Fasilitas yang kurang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT, menghambat proses pembelajaran dan penelitian. Kekurangan ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi operasional, mengurangi kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakan lingkungan belajar yang optimal bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, terbatasnya akses terhadap jaringan internet yang stabil dan cepat mengganggu berbagai kegiatan akademik, seperti kuliah online, penelitian berbasis internet, dan komunikasi antar sivitas akademika. Dalam era digital saat ini, dukungan teknologi dan akses internet yang memadai adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan perguruan tinggi dapat berfungsi dengan baik dan bersaing di kancah global. Tanpa adanya peningkatan signifikan dalam sarana dan prasarana ini, perguruan tinggi akan terus menghadapi kesulitan dalam mencapai standar mutu pendidikan yang diharapkan.<sup>8</sup>

Menurut Arifudin (2019), sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) di Indonesia dikelola oleh badan akreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya Badan Akreditasi

---

<sup>7</sup> Sarvitri, Supriyanto, and Timan, "Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal," 47.

<sup>8</sup> Ri, Lt, and Subroto, "Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19," 15.

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selain itu, SPME juga dapat dikelola oleh lembaga-lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang telah diakui oleh pemerintah. Peran dari badan-badan akreditasi ini adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjamin mutu pendidikan yang diberikan kepada Masyarakat.<sup>9</sup>

Sulaiman dan Wibowo (2016) menjelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kelayakan program studi dan/atau institusi pendidikan tinggi. Penilaian ini dilakukan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang berada di luar perguruan tinggi dan telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan tinggi demi kepentingan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik. Dengan demikian, SPME berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memenuhi standar kualitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan.<sup>10</sup>

Menurut Sauri (2019) dan Syam et al. (2021), eksistensi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 1 butir 27. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BAN-PT merupakan lembaga evaluasi independen yang bertugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Evaluasi yang dilakukan oleh BAN-PT ini berdasarkan pada acuan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, BAN-PT berfungsi sebagai badan yang memastikan bahwa program-program studi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang bermutu tinggi kepada mahasiswa. Peran BAN-PT sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui proses akreditasi yang ketat dan sistematis.<sup>11</sup>

Menurut Yulisma et al. (2023), pemantauan atau penjaminan mutu eksternal mencakup serangkaian evaluasi kualitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga eksternal terhadap institusi pendidikan tinggi. Evaluasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk akreditasi pada tingkat

---

<sup>9</sup> Arifudin, "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi," 163.

<sup>10</sup> Sulaiman and Wibowo, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada," 25.

<sup>11</sup> R Supyan Sauri, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Islam Nusantara Bandung," *Media Nusantara* 16, no. 1 (2019): 27–40; Rifqi Zaeni Achmad Syam, R Supyan Sauri, and Rosiana Nurwa Indah, "Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Prodi Paud Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Universitas Islam Nusantara," *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 147–56.

kelembagaan serta penilaian terhadap program pengajaran dan kualitas penelitian. Selain itu, pemantauan eksternal juga mencakup audit atau tinjauan terhadap prosedur kelembagaan dan pengawasan standar. Penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan mampu mempertahankan atau meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh dan berkelanjutan terhadap berbagai komponen dan aktivitas institusi pendidikan tinggi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa institusi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.<sup>12</sup> Menurut Siswanto dan Silitonga (2023), esensi dari SPME tidak hanya menilai aspek kelayakan, tetapi juga menilai keseluruhan kualitas yang mencakup berbagai elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk sumber daya, proses pembelajaran, dan hasil yang dicapai.<sup>13</sup>

Kriteria akreditasi perguruan tinggi merupakan patokan minimal berdasarkan PerBAN-PT nomor 2 tahun 2017 dan nomor 4 tahun 2017, kriteria ini menjadi dasar dalam proses penilaian dan akreditasi program studi maupun institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan.<sup>14</sup> Pengembangan kriteria akreditasi mengacu SN-Dikti.<sup>15</sup> Akreditasi perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada penilaian kelayakan (compliance) terhadap standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, perguruan tinggi yang berupaya untuk mencapai dan melampaui standar minimal yang telah ditetapkan akan mendapatkan penilaian yang lebih baik dalam proses akreditasi.<sup>16</sup> Dalam proses akreditasi perguruan tinggi, berbagai elemen penilaian diperhatikan untuk mengukur capaian mutu pendidikan tinggi secara komprehensif. Elemen-elemen ini mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keseluruhan kualitas institusi pendidikan tinggi.<sup>17</sup> Elemen pertama yang dinilai adalah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum yang baik harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan adaptif terhadap perubahan dalam bidang ilmu yang mereka tekuni. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga menjadi fokus penilaian. Perguruan tinggi diharapkan menerapkan metode

---

<sup>12</sup> Lia Yulisma et al., "Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal Dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi Di Universitas Galuh," *Jurnal Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2023): 259–66.

<sup>13</sup> Dwi Joko Siswanto and Frangky Silitonga, "Budaya Mutu Sebagai Refleksi Dari PPEPP Dan EPP Di Akademi Militer Magelang," *Jurnal Mahatvavirya* 10, no. 1 (2023): 53–70.

<sup>14</sup> Majelis Akreditasi and Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, "Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT Dan LAM Berbasis SN Dikti," 2019, 20.

<sup>15</sup> Akreditasi and Tinggi, 20.

<sup>16</sup> Akreditasi and Tinggi, 20.

<sup>17</sup> Akreditasi and Tinggi, 20.

pembelajaran yang inovatif. Kualitas dan kuantitas bahan ajar serta sumber belajar lainnya, seperti buku teks, jurnal, dan materi pembelajaran digital, juga menjadi indikator penting dalam menilai mutu kurikulum dan proses pembelajaran.

Kualifikasi dan kompetensi dosen merupakan elemen krusial dalam penilaian akreditasi. Dosen yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan kompetensi yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Rasio dosen terhadap mahasiswa juga diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional dosen serta tenaga kependidikan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan administrasi di perguruan tinggi. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan akan membantu dosen dan tenaga kependidikan untuk selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu dan teknologi. Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang belajar, merupakan elemen penilaian yang tidak kalah penting. Fasilitas yang memadai akan mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang berkualitas. Infrastruktur teknologi informasi juga menjadi faktor penilaian, karena teknologi informasi yang baik akan memudahkan pengelolaan data, komunikasi, dan akses terhadap sumber belajar digital, yang semuanya sangat mendukung proses pendidikan dan penelitian.

Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel menjadi elemen penilaian yang penting dalam proses akreditasi. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Strategi pengembangan perguruan tinggi yang jelas dan terukur menunjukkan visi dan misi yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Efektivitas sistem penjaminan mutu internal juga menjadi indikator penting, karena sistem ini memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan di perguruan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus mengalami perbaikan.

Tingkat pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan yang diharapkan merupakan elemen penilaian utama yang menunjukkan keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi. Lulusan yang kompeten dan siap kerja mencerminkan kualitas pendidikan yang tinggi. Selain itu, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi juga dinilai. Kepuasan mahasiswa menjadi indikator penting karena menunjukkan seberapa baik perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswanya. Dengan memperhatikan dan mengembangkan elemen-elemen penilaian ini,

perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan. Implementasi yang baik dari elemen-elemen ini akan memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memenuhi standar akreditasi.

Selain elemen-elemen yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), penilaian akreditasi perguruan tinggi juga memperhatikan berbagai elemen tambahan yang relevan dan penting untuk memastikan mutu pendidikan tinggi.<sup>18</sup> Elemen-elemen ini mungkin tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti, namun sangat penting untuk memastikan perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, orang tua, industri, dan masyarakat luas. Beberapa elemen tambahan yang diperhatikan dalam penilaian akreditasi adalah:

Inovasi dalam pembelajaran dan penelitian menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian akreditasi. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengadopsi metode pembelajaran inovatif yang mampu mendorong kreativitas dan kemandirian mahasiswa. Metode pembelajaran semisal flipped classroom, dan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi juga didorong untuk mengembangkan program penelitian yang berfokus pada inovasi dan penerapan teknologi baru. Penelitian yang inovatif tidak hanya memperkaya pengetahuan ilmiah, tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan industri.

Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi elemen tambahan yang penting dalam penilaian akreditasi. Perguruan tinggi yang menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi lainnya, dapat memperluas jaringan dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam program pertukaran, penelitian bersama, dan kolaborasi akademik lainnya. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah juga penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian. Melalui kerjasama ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dapat membantu perguruan tinggi.

Pengembangan karir dan kewirausahaan merupakan elemen tambahan lain yang sangat diperhatikan dalam penilaian akreditasi. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan program pengembangan karir yang komprehensif bagi mahasiswa dan lulusan, seperti bimbingan

---

<sup>18</sup> Akreditasi and Tinggi, 20.

karir, pelatihan keterampilan, dan program magang. Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Selain itu, dukungan untuk start-up dan inkubasi bisnis di lingkungan perguruan tinggi juga sangat penting. Perguruan tinggi yang mampu menyediakan fasilitas dan dukungan bagi mahasiswa dan lulusan.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi Indonesia menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran. Hambatan ini sejalan dengan temuan Sarvitri et al. (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya tenaga ahli dan terbatasnya dana menjadi kendala utama dalam perencanaan dan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Selain itu, Ri et al. (2020) mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dukungan teknologi dan jaringan internet, juga menjadi masalah signifikan yang menghambat proses pembelajaran dan penelitian. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan konsisten dengan apa yang telah diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya.

Secara teori, SPME bertujuan memastikan perguruan tinggi berkualitas sebagaimana dijelaskan oleh Arifudin (2019) dan Sulaiman & Wibowo (2016). Namun, data lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan dalam SDM, anggaran, dan fasilitas membuat banyak perguruan tinggi kesulitan dalam mencapai standar tersebut. Kesesuaian antara teori dan data lapangan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan dukungan sumber daya dan infrastruktur untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga tujuan SPME dapat tercapai secara efektif.

Teori yang dikemukakan oleh Arifudin (2019) dan Sulaiman & Wibowo (2016) menekankan bahwa SPME bertujuan untuk menilai dan menjamin mutu perguruan tinggi melalui penilaian oleh badan akreditasi yang diakui pemerintah. Namun, di lapangan, implementasi ini menghadapi kendala yang substansial. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya anggaran merupakan masalah utama yang menghambat pelaksanaan SPME secara efektif. Teori ini cocok dengan masalah yang dihadapi, karena tanpa tenaga ahli dan dana yang memadai, sulit bagi perguruan tinggi untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Menurut Sauri (2019) dan Syam et al. (2021), BAN-PT sebagai lembaga akreditasi memiliki peran penting dalam menetapkan kelayakan prodi dan institusi pendidikan tinggi. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti yang diidentifikasi oleh Ri et al. (2020), menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut. Ini menegaskan pentingnya peran BAN-PT tidak hanya dalam menetapkan

standar, tetapi juga dalam memberikan dukungan untuk peningkatan fasilitas di perguruan tinggi. Teori juga menekankan pentingnya dukungan teknologi dan jaringan internet untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang efektif. Ri et al. (2020) mencatat bahwa tanpa akses yang memadai terhadap teknologi dan internet, perguruan tinggi akan terus tertinggal dalam hal kualitas pendidikan dan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa teori SPME harus memperhitungkan aspek teknologi.

Siswanto dan Silitonga (2023) menyatakan bahwa SPME tidak hanya menilai kelayakan tetapi juga kinerja perguruan tinggi dalam berbagai aspek, termasuk input, proses, dan output pendidikan. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi masih berjuang dengan pemenuhan standar dasar karena keterbatasan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat dukungan eksternal dan internal agar perguruan tinggi dapat memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan.

Kriteria akreditasi yang dijabarkan dalam PerBAN-PT nomor 2 tahun 2017 dan nomor 4 tahun 2017, yang mengacu pada SN-Dikti, mencakup berbagai elemen penting yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi belum mampu memenuhi elemen-elemen ini secara optimal karena berbagai hambatan yang telah disebutkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun standar telah ditetapkan dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan dukungan dan sumber daya.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang efektif harus mencakup beberapa komponen kunci. Pertama, harus ada tenaga ahli yang kompeten dan terlatih dalam penjaminan mutu. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan. Selain itu, SPME yang baik juga membutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk laboratorium yang lengkap, perpustakaan dengan koleksi yang memadai, dan infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Dukungan teknologi dan akses internet yang stabil dan cepat adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang efektif.

Kedua, SPME yang baik harus melibatkan kerjasama dengan lembaga akreditasi, pemerintah, industri, dan institusi pendidikan lainnya. Kolaborasi ini akan membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan relevansi kurikulum, mendapatkan dukungan sumber daya. Selain itu, SPME harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan komitmen dari manajemen perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar akreditasi yang

ditetapkan.

Implikasi dari penelitian ini sangat penting bagi perguruan tinggi, lembaga akreditasi, dan pembuat kebijakan pendidikan. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa untuk mencapai standar akreditasi yang tinggi, diperlukan investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen dan staf administrasi, serta kebutuhan akan fasilitas pendukung. Bagi lembaga akreditasi dan pembuat kebijakan, penelitian ini menekankan perlunya dukungan yang lebih besar dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi. Dengan memperhatikan implikasi-implikasi ini, diharapkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi SPME di PT Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan utama termasuk keterbatasan SDM, keterbatasan Sarpras, serta kendala finansial. Kekurangan tenaga ahli dan dana menghambat pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif. Keterbatasan fasilitas, terutama dukungan teknologi dan jaringan internet, juga menjadi penghalang signifikan. SPME bertujuan untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan tinggi melalui penilaian oleh badan akreditasi yang diakui pemerintah. Namun, di lapangan, banyak perguruan tinggi masih berjuang untuk memenuhi standar dasar karena berbagai hambatan. Pentingnya penilaian kinerja yang komprehensif dalam pendidikan. Karya menunjukkan bahwa meskipun standar akreditasi telah ditetapkan dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan dukungan sumber daya dan infrastruktur. Perguruan tinggi perlu berinvestasi dalam pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen dan staf administrasi. Dukungan teknologi dan akses internet yang memadai juga sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga akreditasi, pemerintah, dan industri, dapat membantu mengatasi beberapa hambatan ini. SPME yang efektif harus melibatkan evaluasi kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kualitas kurikulum, kompetensi dosen, dan fasilitas pendukung. Dukungan manajemen dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi juga sangat penting. Penelitian ini menyoroti bahwa tanpa komitmen yang kuat dari manajemen, upaya penjaminan mutu sering kali tidak mendapatkan prioritas yang layak. Selain itu, perlu adanya dukungan yang lebih besar dalam bentuk

pendanaan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Dengan memperhatikan berbagai elemen penilaian dan elemen tambahan yang relevan, perguruan tinggi dapat meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran lembaga akreditasi seperti BAN-PT sangat penting dalam proses penjaminan mutu. Melalui proses akreditasi yang ketat dan sistematis, lembaga akreditasi dapat memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Dengan demikian, implementasi SPME dan pentingnya dukungan yang lebih besar untuk mengatasi hambatan tersebut. Diharapkan, dengan strategi yang tepat, mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan dukungan sumber daya dan infrastruktur untuk perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan yang mendorong pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen dan staf administrasi sangat dibutuhkan. Selain itu, perlu ada investasi yang lebih besar dalam teknologi dan infrastruktur IT untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga akreditasi, pemerintah, dan industri dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mampu bersaing di tingkat global.

## REFERENCES

- Akreditasi, Majelis, and Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. “Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT Dan LAM Berbasis SN Dikti,” 2019.
- Arifudin, Opan. “Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3, no. 1 (2019): 161–69.
- Atiah, Nurma. “Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0.” In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2020.
- Cahyono, Dwi, Rasid Rasid, Evi Lestari, and Muh Bayu. “Upgrading Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru Di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2023): 355–60.
- Christianingsih, Endah. “Mengenal Manajemen Mutu Perguruan Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 10, no. 1 (2020).
- Fitriani, Luh Putu Widya, and Ida Ayu Aryani Kemenuh. “Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan.” *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu* 2, no. 2 (2021).
- Kusdiby, Kusdiby. “Pendidikan Manajemen Transportasi Dan Logistik Universitas Maritim Amri Semarang Dalam Menghadapi Tantangan Global.” *Attractive: Innovative Education Journal* 3, no. 3 (2021): 185–95.
- Ri, B K D, Gd Nusantara I Lt, and Jl Jend Gatot Subroto. “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19.” *Google Scholar Samsudin, S.(2019). Pentingnya Peran Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*

1, no. 2 (2020): 50–61.

- Sarvitri, Anne, Achmad Supriyanto, and Agus Timan. “Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal.” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 38–51.
- Sauri, R Supyan. “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Islam Nusantara Bandung.” *Media Nusantara* 16, no. 1 (2019): 27–40.
- Siswanto, Dwi Joko, and Frangky Silitonga. “Budaya Mutu Sebagai Refleksi Dari PPEPP Dan EPP Di Akademi Militer Magelang.” *Jurnal Mahatvirya* 10, no. 1 (2023): 53–70.
- Sulaiman, Ahmad, and Udik Budi Wibowo. “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 17–32.
- Syam, Rifqi Zaeni Achmad, R Supyan Sauri, and Rosiana Nurwa Indah. “Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Prodi Paud Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Universitas Islam Nusantara.” *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 147–56.
- Tanjung, Rahman, and Opan Arifudin. “Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah.” *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)* 1, no. 1 (2023): 42–52.
- Yulisma, Lia, Sukri Sukri, Depon Nurul Aida, Okke Rosmaladewi, and Nanang Hanafiah. “Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal Dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi Di Universitas Galuh.” *Jurnal Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2023): 259–66.